

Kedaulatan Gas, Kesejahteraan Rakyat: Program Unggulan Presiden Prabowo dalam Mewujudkan Kekuatan dan Kemandirian Energi Nasional

Updates. - KORLANTAS.ID

Jun 28, 2026 - 13:07



Saiful Chaniago/ Ketua Umum PASPROBO

OPINI - Di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu dan urgensi dekarbonisasi demi menahan laju perubahan iklim, kemandirian energi

bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan pilar utama kedaulatan sebuah bangsa. Dalam konteks ini, visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan energi sebagai program unggulan strategis merupakan langkah teoretis dan praktis yang sangat tepat. Fokus mendalam pada optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik bukan hanya sebuah respons taktis terhadap defisit neraca perdagangan, melainkan rancang bangun (blueprint) transformatif menuju kedaulatan energi yang sejati sekaligus motor penggerak kesejahteraan masyarakat.

Secara akademis, transisi dari energi berbasis fosil berkarbon tinggi menuju energi terbarukan tidak dapat dilakukan dalam semalam tanpa mengorbankan stabilitas pasokan dan pertumbuhan ekonomi. Di sinilah gas bumi memegang peran krusial sebagai energi transisi (bridge fuel). Karakteristik emisi gas bumi secara signifikan lebih bersih dibandingkan minyak bumi dan batu bara, dengan emisi karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan saat pembakaran sekitar 40 hingga 50 persen lebih rendah daripada batu bara per unit energi yang dihasilkan. Sifat gas bumi yang fleksibel dan mampu menyuplai energi secara terus-menerus (baseload) menjadikannya pendamping ideal bagi energi terbarukan seperti surya dan angin yang masih bersifat intermiten (tergantung cuaca). Oleh karena itu, percepatan utilisasi gas bumi domestik merupakan instrumen paling realistis dan objektif untuk menurunkan emisi nasional tanpa harus mengorbankan keandalan pasokan listrik negara.

Lebih jauh lagi, urgensi kedaulatan gas ini berkelindan erat dengan upaya pemulihan makroekonomi nasional melalui pengurangan ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Data menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan produk BBM telah menjadi beban kronis bagi neraca pembayaran dan menekan nilai tukar Rupiah. Dengan mengalihkan konsumsi energi dari BBM ke gas bumi—baik melalui program gasifikasi pembangkit listrik, optimalisasi jaringan gas (jargas) rumah tangga, maupun pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor transportasi—pemerintah secara langsung memperkuat fiskal negara. Devisa yang selama ini mengalir keluar untuk membiayai impor minyak dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur domestik berlipat ganda, yang pada gilirannya memperkuat struktur ketahanan energi nasional dari guncangan harga komoditas global.

Dampak multiplikasi (multiplier effect) dari kedaulatan gas bumi ini paling nyata terlihat pada peningkatan daya saing sektor industri nasional. Gas bumi bukan sekadar sumber bahan bakar bagi mesin-mesin pabrik, melainkan bahan baku vital (feedstock) bagi industri-industri strategis seperti industri pupuk, petrokimia, baja, dan semen. Kepastian pasokan gas domestik dengan harga yang kompetitif dan stabil bertindak sebagai insentif non-fiskal terbesar yang mampu memicu gelombang investasi baru. Ketika biaya energi industri dapat ditekan dan efisiensi meningkat, produk-produk manufaktur Indonesia akan memiliki daya saing yang jauh lebih kuat di pasar internasional. Hilirisasi industri berbasis gas bumi ini secara otomatis akan memperluas lapangan kerja berkualitas tinggi, menyerap tenaga kerja lokal, dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) secara berkelanjutan.

Pada titik kulminasi argumen, seluruh rangkaian strategi kemandirian energi ini

bermuara pada satu tujuan fundamental: kesejahteraan rakyat. Ketika industri bertumbuh pesat dan ekonomi makro stabil berkat kedaulatan energi, efek kesejahteraan akan menetes langsung ke masyarakat lapisan bawah. Jaringan gas rumah tangga yang dibangun secara masif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memberikan akses energi yang lebih murah, aman, dan bersih bagi dapur-dapur rakyat dibandingkan penggunaan LPG tabung konvensional yang sebagian besar masih disubsidi dan diimpor. Distribusi energi yang merata dan berkeadilan ini memangkas pengeluaran bulanan tangga, sehingga meningkatkan daya beli riil masyarakat.

Melalui pendekatan yang komprehensif, objektif, dan terukur ini, kebijakan gas bumi era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dipandang sebelah mata hanya sebagai komoditas ekonomi belaka. Kebijakan ini adalah manifestasi dari pemikiran strategis yang menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi mutakhir, kesejahteraan sosial, dan komitmen lingkungan masa depan. Menjadikan gas bumi sebagai jangkar kemandirian nasional adalah pembuktian bahwa kedaulatan energi bukan sekadar jargon politik, melainkan sebuah realitas konkret yang sedang dikonstruksikan demi membawa Indonesia keluar dari jebakan negara pendapatan menengah menuju bangsa yang kuat, mandiri, dan sejahtera.

Jakarta, 28 Juni 2026

Saiful Chaniago/ Ketua Umum PASPROBO